



# FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



**PENDAPAT AKHIR MINI  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

Disampaikan oleh : Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P.  
Nomor Anggota : A - 568

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan.  
Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat;

- Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI beserta jajaran,
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran,
- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajaran,
- Menteri Keuangan RI beserta jajaran,
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajaran,
- Menteri Perhubungan RI beserta jajaran,
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI,
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
- Serta seluruh hadirin yang Kami hormati.

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tanggapan dan pendapat atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas dibidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang perkembangannya harus dijamin oleh negara, agar tercapai keseimbangan dan

pemerataan pembangunan antar daerah. Selain itu, pembangunan jalan dapat memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan ketahanan nasional.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah secara konsisten mendorong agar revisi Undang-undang Tentang Jalan dapat menghadirkan perbaikan kualitas kehidupan rakyat, menyediakan aksesibilitas jalan yang aman, nyaman, berkeadilan bagi semua pihak, serta mengoneksikan pusat-pusat pertumbuhan dari hulu ke hilir, sehingga mampu mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik lagi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Ke-VI Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono bersama Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah meletakkan dasar perencanaan pembangunan nasional terkait konektivitas antarpulau yang berbasis pada keunggulan wilayah masing-masing daerah. Melalui Pilar *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan salah satu fokus pada penguatan konektivitas nasional

**SAUDARA PIMPINAN KOMISI V DPR RI, PARA ANGGOTA DEWAN, PARA MENTERI BESERTA JAJARAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.**

Melalui berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang telah dilaksanakan di dalam rapat-rapat Komisi V DPR RI dengan Pemerintah, maka Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan beberapa catatan krisis sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian pada kondisi jalan di berbagai daerah yang perlu perbaikan dan penambahan jalan baru untuk konektivitas antar daerah dengan cara mempercepat mobilitas barang dan atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia; terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tetap memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk mengambil alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota juga Desa) termasuk memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan daerah di luar dana transfer ke daerah dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk menyediakan *data base* terintegrasi antara Pusat dan Daerah terkait peta jalan (*road map*) pengaturan jalan umum yang dapat diakses oleh publik. Hal itu sebagai upaya transparansi agar publik dapat mengetahui, mengontrol, dan memperhatikan standar kelayakan finansial dan fisik, serta keamanan pembangunan jalan umum yang baik dan berlaku secara nasional.
4. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk mengupayakan pembebasan hak atas tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum secara berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan bertanggungjawab.
5. Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah tidak memberikan dukungan jaminan pendanaan terhadap Badan Usaha Jalan Tol yang gagal mewujudkan tingkat kelayakan finansial jalan tol sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena tidak berkeadilan dan akan berpotensi membebani APBN di masa akan datang.
6. Fraksi Partai Demokrat setuju bahwa Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan aksesibilitas daerah potensial, meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemberlakuan Tarif Tol, evaluasi, dan penyesuaian tarif Tol dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

**SAUDARA PIMPINAN KOMISI V DPR RI, PARA ANGGOTA DEWAN, MENTERI BESERTA JAJARAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.**

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memahami bahwa Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ini diharapkan dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan 6 (enam) poin-poin catatan di atas, maka dengan ini Fraksi Partai Demokrat DPR RI dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan untuk disahkan dan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena **Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat! Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit!**

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 1 Desember 2021  
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua

Sekretaris

H. Agung Budi Santoso, S.H., MM  
Nomor Anggota: A - 538



Marwan Cik Asan, M.M  
Nomor Anggota: A - 535